

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 73 TAHUN 2004 SERI D.54

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 58 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta terdesentralisasi kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanagal 8 Agustus 1350);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Ketertiban dan Ketentraman, masih berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang baru tentang Pembentukan Satpol PP.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung' with a stylized flourish at the end.

NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 73
SERI D.54**